

RENJA

RENCANA KERJA

KECAMATAN PULAU LAUT



KABUPATEN NATUNA

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Air Kundur, 24 September 2025

CAMAT PULAU LAUT KABUPATEN NATUNA



BAMBANG ERAWAN, S.I.P,M.A.P
NIP. 19750306 200801 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PULAU LAUT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulau Laut Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	42
3.3. Tujuan dan Sasaran	43
3.4. Kebijakan Program dan Kegiatan	48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja Program	50
----------------------------------	----

BAB V PENUTUP..... 60

DAFTAR TABEL

2.1.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	12
2.1.2	Capaian Indikator Program Tahun Sebelumnya	23
2.1.3	Capaian Indikator Kegiatan Tahun Sebelumnya	23
2.2.1	Capaian Kinerja Pelayanan 2022-2024	25
2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5.1	Daftar Usulan Musrenbang Tahun untuk TA 2026.....	35
3.3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2026.....	46
3.3.2	Tujuan, Sasaran dan ProgramTahun 2026	47
3.4.1	Indikator Sasaran Program	48
4.4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2026 Prakiraan maju Tahu 2027	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Pulau Laut terbentuk sebagai bagian dari Kabupaten Natuna yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2024. Kecamatan Pulau Laut merupakan unsur penunjang Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

b. Fungsi dan Kewenangan

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebelum Penetapan Renja setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16, pasal 126 dan pasal 131 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan sesuai dengan tahapan.

Diantara tahapan penyusunan dokumen Renja yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah adalah : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Pulau Laut merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pulau Laut yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna. Renja Kecamatan Pulau Laut memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pulau Laut dalam 1 (satu) tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Kecamatan Pulau Laut mengkomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Pulau Laut mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Camat Pulau Laut tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Pulau Laut meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Kecamatan Pulau Laut mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;

- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Kecamatan Pulau Laut dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Kerja Kecamatan Pulau Laut memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Kecamatan Pulau Laut, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dan memperhatikan dokumen Renstra Kecamatan Pulau Laut tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Pulau Laut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2831);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut disusun sebagai pedoman dan arah bagi Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Pulau Laut.

2. Tujuan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Pulau Laut ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Laut;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pulau Laut
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PULAU LAUT

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PULAU LAUT KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing masing unit kerja dan atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun berkenaan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja kelurahan kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 dan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Pulau Laut

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp 2.962.490.050,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.873.918.589,00 atau sebesar.....%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2025 dan capaian Renstra Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/ Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- 1) Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

2. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan dikarenakan terjadinya Rasionalisasi anggaran.
3. Penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
 - a. Komitmen dan kerja sama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pulau Laut secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2026 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Tabel 2.1.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Pulau Laut pada Tahun 2025

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Laut

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dev			
					5		6		7			
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	20	308,579,500	20	125,000,000	20	182
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	308,579,500	100	125,000,000	100	182
4.01.02.2.02.01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Delumrah Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	308,579,500	1	125,000,000	1	182
7.		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.		KECAMATAN										
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	87.00	20,000,000	70.04	28,255,000	87.00	23,000,000	87.00	15
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67	20,000,000	100	28,255,000	67	23,000,000	67	15
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	6	28,255,000	2	23,000,000	2	15
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	2,945,431,899	100	9,665,617,276	80	2,566,082,899	80	4,490

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direv			
					5		6		7			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,400,208,763	2	6,307,603,445	1	1,325,001,753	1	2,621
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1,400,208,763	34	6,307,603,445	19	1,325,001,753	19	2,621
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Person	95	25,000,000	0	0	95	25,000,000	95	
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25,000,000	0	0	1	25,000,000	1	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Person	75	464,132,135	100	1,212,471,907	75	234,960,136	75	661
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	0	0	12	30,000,000	12	
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	22	120,396,250	12	12,000,000	12	7
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	122	112,255,750	12	10,000,000	12	6
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	60	149,275,000	12	35,000,000	12	101
7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	0	12	5,000,000	12	
7.01.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	14	178,401,000	1	5,000,000	1	10
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	245,132,135	111	652,127,007	52	115,990,130	52	305
7.01.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	20,000,000	0	0	40	20,000,000	40	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dev			
					5		6		7			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	330,000,000	50	194,449,798	75	125,000,000	75	170
7.01.012.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	80,000,000	0	55,749,798	2	80,000,000	2	50
7.01.012.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50,000,000		0	3	25,000,000	3	
7.01.012.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	200,000,000	7	138,700,000	7	20,000,000	7	114
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	352,000,000	100	1,023,100,476	100	352,000,000	100	564
7.01.012.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	462	40,074,000	12	6,000,000	12	15
7.01.012.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	35,000,000	14	35,077,700	12	36,000,000	12	18
7.01.012.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	310,000,000	27	047,048,776	12	310,000,000	12	526
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	384,091,000	155	928,991,750	80	504,091,000	80	481
7.01.012.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	164,091,000	6	630,691,750	5	254,091,000	5	376
7.01.012.09.05		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000		0	5	100,000,000	5	
7.01.012.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120,000,000	4	298,310,000	2	120,000,000	2	10
7.01.012.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang di ev			
					5		6		7			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp
		atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi									
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	382.170,000	67,86	737.168,880	100	281.519,000	100	486
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	382.170,000	36	737.168,880	55	281.519,000	55	486
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	382.170,000	22	737.168,880	12	281.519,000	12	48
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	40,000,000	100	153.249,384	100	40,000,000	100	132
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	40,000,000	100	153.249,384	100	40,000,000	100	132
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	40,000,000	16	153.249,384	5	40,000,000	5	132
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	81	68.769,659	25	12,000,000	25	52
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	80	40,000,000	100	68.769,659	80	12,000,000	80	52
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40,000,000	16	68.769,659	12	12,000,000	12	52
7.01.05.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100,000,000	75	42.810,000	100	120,000,000	100	73

Kode	Sasaran	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direv			
					5		6		7			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	100,000,000	100	42,810,000	100	120,000,000	100	73
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	40,000,000	12	42,810,000	4	60,000,000	4	70
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	60,000,000		0	12	60,000,000	12	

Tabel 2.1.2 Capaian Indikator Program Tahun Sebelumnya

Program	Indikator	Target	Capaian
Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJiP	79,85	69,20
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	85	85
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	90
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pesentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	100	95
Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pesentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	80
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100

Tabel 2.1.3 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	70
dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	80
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	60
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	80
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	75
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna pada tahun 2024 secara keseluruhan belum relatif baik dikarenakan adanya Rasionalisasi. Hal ini terlihat dari 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2024, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan pungsi lainnya tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Laut Tahun 2022-2024

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir RENSTRA (2026)	Target			Realisasi			Capaian		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	0	100	100	100	100	100	0	100	100	0	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79,87	80	79,90	79,95	79,95	72,34	65,65	71,20	90,54	82,11	89,05
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	90	80	85	85	80	85	85	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	0	100	100	100	100	85	90	90	85	90,00	90,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	0	100	100	100	100	80	95	95	80	95,00	95,00
Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pesentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	100	100	100	100	80	80	80	80	80,00	80,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Kecamatan Pulau Laut sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur
 - 2) Belum optimalnya Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
 - 3) Belum optimalnya Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Laut
 - 4) Masih lemahnya integritas data antara Kecamatan Pulau Laut dan Perangkat Daerah
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pulau Laut adalah sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Pulau Laut memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
 - c. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - d. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - e. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - f. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - g. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - h. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pulau Laut adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
- 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
- 3) Banyaknya pembenahan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna sebagai berikut :
 - a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Kecamatan Pulau Laut dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
 - b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada table review berikut

Tabel 2.4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PULAU LAUT KAB. NATUNA TAHUN
2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AJDER PERIODE REINTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PULAU LAUT						2.690.895.310,00							4.962.601.899,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0,00							125.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						0,00							125.000.000,00	
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perwujudan pemenuhan kebutuhan dibidang keagamaan	-			20 PERSEN	0,00						-	125.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelayanan Kebutuhan Rakyat	Terlaksananya Festival Penghargaan Bina Mental Spiritual	-			100 persen	0,00			-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	4.01.02.2.02.0001	Festival Penghargaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Festival Penghargaan Bina Mental Spiritual				100 Persen Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kot/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.690.895.310,00							4.937.601.899,00	
	7.01	KECAMATAN						2.690.895.310,00							4.937.601.899,00	
1	7.01.01	PROGRAM PEMBIYANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.640.667.310,00						-	3.920.431.899,00	
	7.01.01.2.01	Pencapaian, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kot/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Muti Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kot/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
		URUSAN / BIDANG				PRAKRAAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027					

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET REJENIA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PADU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PADU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	2.002.389.510,00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peran masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, pers, dan perserikatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.142.140.869,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.02.0001	Pengadaan Gaj dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN	-	-	-	20 Orang/bulan	2.002.389.510,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kori/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peran masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, pers, dan perserikatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.142.140.869,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	145.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas Berbasis Akibat Kelangkaannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Paket Pakan Dinas Berbasis Akibat Kelangkaan	-	-	-	1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kori/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah, Undang-undang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah, Undang-undang	-	-	-	3 Orang	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kori/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.06	Administrasi Pengantar Daerah	-	-	-	-	-	146.910.400,00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peran masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, pers, dan perserikatan	-	-	-	889.291.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REHSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REHMA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REHMA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.06.0002																
		Penyediaan Fasilitas dan Partisipasi Kurir														
			Jumlah Paket Fasilitas dan Partisipasi Kurir yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA - ALOKASI UMUM (DAU)	Mempokus ke reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng akut peng egiatan dan pemberian aman konstitusi, narkoba, judi, dan pe nyelubungan	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
7.01.01.2.06.0003																
		Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA - ALOKASI UMUM (DAU)	Mempokus ke reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng akut peng egiatan dan pemberian aman konstitusi, narkoba, judi, dan pe nyelubungan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
7.01.01.2.06.0004																
		Penyediaan Bahan Logistik Kurir														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kurir yang Disediakan				12 Paket	70.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, (DAU) Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Mempokus ke reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng akut peng egiatan dan pemberian aman konstitusi, narkoba, judi, dan pe nyelubungan	Peningkatan Kualitas politik, Sumber hukum dan Daya birokrasi, Manusia serta meng akut peng egiatan dan pemberian aman konstitusi, narkoba, judi, dan pe nyelubungan	-		20.000.000,00 LAUT	KECAMATAN PULAU LAUT
7.01.01.2.06.0005																
		Penyediaan Biring Cetak dan Penggandaan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Daerah	-	-			-	454.900.200,00			Menyediakan informasi politik, hukum dan ekonomi, serta membantu urusan dan pemerintahan umum, koordinasi, narkotika, jasi, dan pengendalian	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	332.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.00.0001	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Narkotika, Pulau Laut, Serta Kaki Deras	DANA, ALOKASI UNDAK (DAU)	Menyediakan informasi politik, hukum dan ekonomi, serta membantu urusan dan pemerintahan umum, koordinasi, narkotika, jasi, dan pengendalian	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Kemasyarakatan, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kemasyarakatan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.400.200,00	Kab. Narkotika, Pulau Laut, Serta Kaki Deras	DANA, ALOKASI UNDAK (DAU)	Menyediakan informasi politik, hukum dan ekonomi, serta membantu urusan dan pemerintahan umum, koordinasi, narkotika, jasi, dan pengendalian	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		38.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Harat yang Disediakan				12 Laporan	438.526.000,00	Kab. Narkom, Pulau Laut, Semua Kasi/Desa	DANA, AL OKAS UMUM (DALU)	Mempertuakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta mengaitkan dengan pemerintah dan pemerintah lain, termasuk, narkom, jasi, dan pernyakutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			310.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.00		Peningkatan, Dorong, Misi, Dan Peran yang Urusan Peningkatan Daerah	-	-	-	-	432.451.200,00			Mempertuakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta mengaitkan dengan pemerintah dan pemerintah lain, termasuk, narkom, jasi, dan pernyakutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	432.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.00.0000	Peningkatan Jasa Peningkatan, Gaya Peningkatan, Peningkatan Peranan Kemandirian Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kemandirian, Dorong, Operasional, yang Disediakan dan Diberikan Peningkatan				5 Unit	20.000.200,00	Kab. Narkom, Pulau Laut, Semua Kasi/Desa	DANA, AL OKAS UMUM (DALU)	Mempertuakan informasi publik, hukum dan kebijakan, serta mengaitkan dengan pemerintah dan pemerintah lain, termasuk, narkom, jasi, dan pernyakutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			310.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	2.01.01.2.00.0000	Peningkatan Peningkatan dan Misi Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAQU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAQU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

			Jumlah Perbaikan dan Meror Lainya yang Diperbaiki				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kab/Desa	DANA, ALOKASI UNJUM (DAU)	Menyertakan 1 referensi publik, bukan dari brokern, serta mengahut pers ngahan dan perbenan asan kordinasi, naskah, jati, dan per ngadapan	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT	
7.01.01.2.00.0000																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirusak/Dirusak				2 Unit	22.440.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kab/Desa	DANA, ALOKASI UNJUM (DAU)	Menyertakan 1 referensi publik, bukan dari brokern, serta mengahut pers ngahan dan perbenan asan kordinasi, naskah, jati, dan per ngadapan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT	
7.01.01.2.00.0000																	
			Jumlah Service dan Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirusak/Dirusak				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kab/Desa	DANA, ALOKASI UNJUM (DAU)	Menyertakan 1 referensi publik, bukan dari brokern, serta mengahut pers ngahan dan perbenan asan kordinasi, naskah, jati, dan per ngadapan	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT	
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi/ penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			100 persen	50.200.000,00						-	507.170.000,00		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAJU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAJU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

			Jumlah Laporan Koordinasi yang diunggah ke sistem yang Tagas dan Pengujiannya di Bidang Pengujiannya Pengujiannya dan/atau Pengujiannya Pengujiannya			12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Serua KSDDesa	DANA - ALOKASI UMUM (DALU)	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
5	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintah pemerintahan lokal pemerintahan dan pengawasan pemerintahan desa	-		100 persen	0,00					-	148.000.000,00	
	7 01 06 2 01	Penyuluhan, Rekomendasi dan Koordinasi	Penyuluhan Desa yang memonitoring dan/atau Pengujiannya dan/atau Pengujiannya	-		100 Persen	0,00					-	140.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7 01 06 2 01 000	Pemerintah Sistemisasi Pemerintahan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
			Jumlah Dokumen Sistemisasi Pemerintahan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			4 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Serua KSDDesa	DANA - ALOKASI UMUM (DALU)	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7 01 06 2 01 001	Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kawasan Pesisiran di Wilayah Kecamatan												
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kawasan Pesisiran di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Serua KSDDesa	DANA - ALOKASI UMUM (DALU) KSDDesa	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
			J U M L A H				2.890.895.310,00						4.962.601.899,00	

Pulau Laut, 24 September 2025
CAMAT PULAU LAUT

BAMBANGERAWAN, S.I.P.,M.A.P.
 NIP. 197503062008011010

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan Daerah memiliki berbagai pendekatan dalam prosesnya, pendekatan itu diantaranya teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan bawah-atas atau bottom-up merupakan salah satu perwujudan Pemerintah Daerah yang mendorong partisipasi masyarakat, sebab ide pembangunan untuk saat ini tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakat (top-down) tetapi juga yang bersifat mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu wadah untuk penyampaian usulan-usulan dari masyarakat, dimana tahapan atau proses musrenbang berlangsung mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Kecamatan Pulau Laut melaksanakan musrenbang baik di tingkat Desa/kelurahan melalui 3 Desa se-Kecamatan Pulau Laut dan juga di tingkat kecamatan. Adapun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pelaksanaan musrenbang di kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
2. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA kabupaten/kota.
3. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
4. Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
5. Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
6. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
7. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

8. Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2025 untuk rencana pembangunan tahun 2026 telah menetapkan sub kegiatan pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan baik untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN harus berdasarkan usulan masyarakat yang mana dimusyawarahkan melalui musrenbang.

Kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat urgensi penanganan
- b. Pemenuhan Pelayanan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, PUPR, Perumkim, Sosial dan Penanganan Bencana)
- c. Mendorong percepatan prioritas pembangunan dalam RPJMD (Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi).

Tabel 2.5.1
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) 2026
DAFTAR USULAN PRIORITAS TINGKAT KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2027

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Fisik / Non Fisik	Volume	Pagu	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
				(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN PULAU LAUT					
1	Refitalisasi Pelabuhan Beton Tanjung Batu Desa Air Payang	Fisik	3,20 x 130 m		APBD	Dinas PUPR Kab. Natuna
2	Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah Masjid Al-Huda Desa Kadur	Fisik			APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Desa Tanjung Pala	Fisik			APBD	Dinas Perhubungan
4	Lanjutan Pembangunan Peningkatan Beton bertulang jalan lingkar pulau laut	Fisik			APBD	Dinas PUPR
5	Revitalisasi SDN 003 Kadur Kecamatan Pulau Laut	Fisik			APBD	Dinas Pendidikan
6	Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Beton Desa Air Payang	Fisik			APBD	Dinas Perhubungan
7	Revitalisasi RKB dan Pengadaan Meubiler SDN 001 Desa Air Payang	Fisik			APBD	Dinas Pendidikan

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Fisik / Non Fisik	Volume	Pagu	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
8	Pembebasan Lapangan Bola Kaki Desa Tanjung Pala	Fisik			APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
9	Pembangunan Cold Storege Desa Kadur	Fisik			APBD	Dinas Perikanan
10	Revitalisasi Pustu Desa Air Payang	Fisik			APBD	Dinas Kesehatan
11	Pembangunan Pelantar Rakyat Dusun 1 Genting RT 001/RW 001 Desa Tanjung Pala	Fisik			APBD	Dinas PUPR
12	Pengadaan Bibit Kelapa Hibrida untuk Petani Desa Air Payang	Fisik			APBD	Dinas Pertanian
13	Pembangunan Rumah Tunggu Desa Kadur	Fisik			APBD	Dinas Perhubungan
14	Pengadaan Oven Pengering Bilis Khusus Nelayan Desa Tanjung Pala	Fisik			APBD	Dinas Perikanan
15	Rehab Panggung Seni SDN 002 Desa Tanjung Pala	Fisik			APBD	Dinas Pendidikan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, Visi Misi Presiden 2025 – 2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025 – 2049. RPJMN 2025 – 2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 Program Prioritas Presiden :

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKMelalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik Mandiri Lainnya
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan

Ekonomi

16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Sedangkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Wins adalah sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap dengan kualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat Negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Merujuk Permendagri 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah tentang RPJMD harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ialah untuk menjabarjab visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna menjadi dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan penyusunannya tetap mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan tingkat Provinsi dan Pusat serta dokumen perencanaan lainnya sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna ialah untuk mewujudkan pemmbangunan daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan teraget capaian pada akhir tahun

perencanaan RPJMD, memberikan tolak ukur bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1 (satu) tahunan maupun 5 (lima) tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Jarmin, SE dengan visi dan misi

VISI

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA YANG MAKMUR BERDAYA
SAING DAN BERBUDAYA”***

MISI

1. Meningkatkan perekonomian berbasis kemaritiman dan keunggulan daerah yang berwawasan lingkungan
2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan konektivitas antar pulau
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berkarakter dan berbudaya
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi
5. Memperkuat nilai keagamaan dan melestarikan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran

3.2 Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2026 berfokus pada tiga hal yaitu :

1. Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan Pulau Laut adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang ada dikecamatan serta memberikan layanan public terhadap segala bentuk administrasi yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan.
2. Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan

Pulau Laut adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Melaksanakan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Laut yaitu pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Kecamatan Pulau Laut merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah

dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna adalah Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang Bersih, Berwibawa dengan memberikan Pelayanan Prima sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tahun 2026

MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada

Tabel 3.3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2026
Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna

SKPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Kondisi Awal	Target 1	Target 2	Target 3	Target 4	Target 5	Satuan	Formula	Sumber Data
Kecamatan Pulau Laut	4.1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.1.1.1.1. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		3.05	3.08	3.10	3.15	3.18	3.20	Indeks	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Pulau Laut	4.1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.1.2.1.1. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70,40	71.20	71.50	72.00	72.50	73.00	Nilai	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Inspektorat
Kecamatan Pulau Laut	4.1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	5.1.1.1.1. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina		70	70	70	80	80	90	Persen	Jumlah kegiatan keagamaan yang dibina / Jumlah kegiatan keagamaan x 100	Kasi PMD
Kecamatan Pulau Laut	4.1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	5.1.1.2.1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		65	70	75	80	85	90	Persen	Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada di bagi Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan x 100	Kasi Trantib

3.4 Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2026, maka pada tahun 2026 arah kebijakan program kegiatan Kecamatan Pulau Laut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu melalui upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang berbasis digital, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran dll. Diantara bentuk strategi nya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik bagi entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Serta Peningkatan layanan administrasi kepegawaian.
2. Peningkatan Ekonomi Daerah, yaitu melalui optimalisasi kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Mendorong penyerapan anggaran APBD seoptimal mungkin dalam bentuk percepatan belanja daerah fisik maupun non fisik. Melakukan koordinasi terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Pulau Laut.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, ada dua yang menjadi sasaran yaitu SDM Pemudaan sebagai asset daerah dan SDM Kepegawaian. SDM Kepemudaan melalui peningkatan pendidikan iman dan taqwa. strateginya yang akan ditempuh untuk peningkatan kualitas SDM yaitu penguatan IMTAQ kalangan remaja melalui kegiatan Bina Mental Spritual. Sementara SDM kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan diklat fungsional, bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang strategis.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.1 Indikator Sasaran Program Kecamatan Pulau Laut

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2026
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Menigkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	30

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	100
	Meningkatnya nilai laporan LKJiP	Nilai Laporan LKJiP	71.20
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemenuhan koodinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 serta Resntra Kecamatan Pulau Laut 2025-2029.
2. Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Kecamatan Pulau Laut bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.
3. Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan.
5. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Kecamatan Pulau Laut
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah 2 program dan 5 kegiatan dan 11 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rancangan Renja tahun 2026 adalah sebesar 2.690.895.310,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2025- 2029

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Kecamatan Pulau Laut agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Pulau Laut melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan perangkat daerah yang lain.

Semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2026 mendorong peningkatan kualitas kinerja dalam perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Selain itu diharapkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Pulau Laut tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 24 September 2025

**CAMAT PULAU LAUT KABUPATEN
NATUNA**



BAMBANG ERAWAN, S.I.P.M.A.P
NIP. 19750306 200801 1 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH

SKPD : KECAMATAN PULAU LAUT
TAHUN : 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
4.11.11.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,50
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,00
5.11.11.	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	Persen	90
5.11.21.	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persen	90

Ranai, 18 April 2026

Camat Pulau Laut

BAMBANG ERAWAN, S. IP, M.A.P
NIP. 19750306 200801 1 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

SKPD : KECAMATAN PULAU LAUT
TAHUN : 2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
01.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output		Dokumen	2
		Outcome	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persan	67,00
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	3.854.775.995
		Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62
		Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	17
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.05.	Administrasi Kopegawaian Perangkat Daerah				
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	90.000.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	25.000.000
		Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9
		Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tahun	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	148.000.000
		Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24
		Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun	4
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10
		Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	3.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	62.523.474
		Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tahun	4
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.05.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	244.588.263
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	10
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	20
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	5.000.000
		Output	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	14
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	16.000.000
		Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	85.000.000
		Output	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	8

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks	3,48
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	13.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks	3,48
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	26.800.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	58
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahun	26
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks	3,48
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	694.296.940
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tahun	21
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks	3,48
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	12.000.000
		Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks	3,48

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tahun	48
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.09.05.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30.000.000
		Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	90.000.000
		Output	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tahun	2
		Output	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	6
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	80.000.000
		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,48
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.01.	Pecencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	2

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		Outcome	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67,00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	207.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	6
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Orang	2
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tahun	19
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan	Persen	100,00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	482.170.000
		Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12
		Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Orang	4
		Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Orang/bulan	2

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tahun	70
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100,00
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan				
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	58.000.000
		Output	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Masyarakat	4
		Output	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tahun	16
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	18.000.000
		Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12
		Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tahun	12

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80,00
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	38.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	10
		Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Orang	15
		Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tahun	6
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00
06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	10
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100,00

Ranai, 18 April 2026

Camat Pulau Laut



BAMBANGRAWAN, S.I.P, M.A.P
Nip. 19750306 200801 1 010